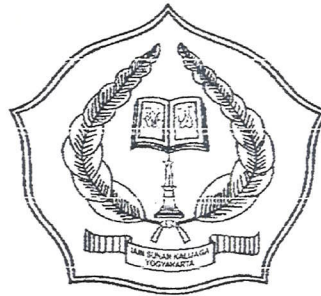


**VISI, MISI DAN PLATFROM PARTAI GOLKAR
PERSEPEKTIF FIQIH SIYASAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MUDASIR ABAS
NIM: 00370304

PEMBIMBING:

- 1. Drs. H. ABD. MADJID, AS**
- 2. H. M. NUR, S.Ag. M.Ag**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

ABSTRAK

Golkar sebagai kekuatan politik yang masih eksis sejak pertama kali kemunculannya pada 20 Oktober 1964 hingga sekarang masih terus di perbincangkan. Keberhasilannya meraih suara terbanyak pada setiap pemilu, membuktikan bahwa Golkar masih di percaya masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Isu perpecahan di dalam tubuh partai, tuntutan di bubarkannya partai Golkar, gebragan konvensi yang demokratis, hingga distempel buruk yang diberikan masyarakat sebagai partai yang harus bertanggung jawab atas keterpurukan bangsa ini telah dilalui Golkar dalam perjalanan politiknya. Nuansa reformasi telah didengungkan Golkar, perbaikanpun harus dilaksanakan agar semangat reformasi tidak mudah pudar. Perbaikan di tubuh Golkar antara lain dengan pemutusan tiga jalur yaitu jalur ABRI, birokrasi dan Golkar, tidak lagi adanya dewan pembina, serta memperbaiki visi, misi, platform dan landas pijak perjuangannya.

Adanya persoalan politik yang setiap kali muncul dengan label SARA membawa bangsa ini semakin terpuruk dalam krisis di berbagai bidang. Belum lagi budaya politik uang, korupsi, dan kolusi dan nepotisme yang dilakukan para politisi dalam merebut kursi kekuasaan semakin menambah beban bangsa ini ke jurang kehancuran.

Golkar sebagai salah satu kekuatan politik tentunya tak ingin melihat bangsa ini tersus didera persoalan. Prinsip politik yang ada dalam visi, misi dan platform yang menjadi landasannya akan senantiasa di implementasikan dalam perjuangannya. Keterbukaan, demokratis, adil, dan persatuan harus terwujud dalam sebuah negara yang majemuk. Tanpa semua itu tidak akan tercipta masyarakat adil dan makmur seperti yang di harapkan para pendiri bangsa kita. Prinsip-prinsip yang menjadi cita-cita normatif yang diperjuangkan tetap merujuk pada Pancasila. Nilai-nilai yang ada dalam pancasila pada dasarnya sesuai dengan nafas gerak Islam yang senantiasa menekankan keadilan, persamaan, musyawarah, persatuan, dan ketuhanan.

Al-Ghazali dengan prinsip moral politiknya yang sangat menekankan insan kamil, keadilan, toleransi, amanah, dan jujur harus diterapkan dalam pemerintahan. Prinsip itu sebagai kunci sebuah pemerintahan yang baik sehingga bisa terwujudnya suatu susunan masyarakat madani.

Dengan model pendekatan yang digunakan al-Gahazali setidaknya prinsip-prinsip yang digunakan partai Golkar yang berasaskan Pancasila, dalam mewujudkan masyarakat adil, dan berkedaulatan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Nilai-Nilai perjuangan partai Golkar tidak bertentangan dengan nilai Islam yang sangat menghargai perbedaan pendapat dan musyawarah.

Drs. H. Abd. Madjid, AS
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi saudara Mudasir Abas

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di- Y o g y a k a r t a

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan skripsi saudara:

Nama : Mudasir Abas

N I M : 00370304

Fakultas : Syariah

Jurusan : Jinayah- Siyasah

Judul Skripsi : *Visi, Misi, dan Platfrom Partai Golkar Perspektif Fiqih Siyasah*

Kami selaku pembimbing, menyatakan bahwa skripsi tersebut siap dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Muharram 1425 H.
9 Februari 2005 M.

Hormat kami,
Pembimbing I



Drs. Abd. Madjid, AS
NIP: 150192830

H. M. Nur, S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi saudara Mudasir Abas

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di- Y o g y a k a r t a

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan skripsi saudara:

Nama : Mudasir Abas
N I M : 00370304
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Jinayah- Siyasa
Judul Skripsi : *Visi, Misi, dan Platfrom Partai Golkar Perspektif Fiqih Siyasa*

Kami selaku pembimbing, menyatakan bahwa skripsi tersebut siap dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Muharram 1425 H.
9 Februari 2005 M.

Hormat kami,
Pembimbing II



H. M. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP: 150282522

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

VISI, MISI, DAN PLATFROM PARTAI GOLKAR PERSPEKTIF FIIQH SIYASAH Yang Disusun Oleh:

Mudasir Abas
NIM. 00370304

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 29 Safar 1426 H / 7 April 2005 M, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 2 Rabi'ul Awal 1426 H.

11 April 2005 M.



Dekan Fakultas Syariah

Drs. Malik Madany, M.A.

NIP. 150182698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Zulkasji A. Salam

NIP. 150046306

Sekretaris Sidang

Siti Djazimah, S.Ag.

NIP. 150282251

Pembimbing I

Drs. H. Abdul Madjid, AS.

NIP. 150192830

Pembimbing II

H. M. Nur, S.Ag. M.Ag.

NIP. 150282522

Penguji I

Drs. H. Abdul Madjid, AS.

NIP. 150192830

Penguji II

Drs. Rizal Qosim, M.Si

NIP. 150256649

MOTTO

قل الحق ولو كان مرأ (رواه البخاري)

"Katakanlah Kebenaran Sepahit Apapun Keadaannya"
(HR. Bukhari)

*"Kebahagiaan tertinggi adalah
pengakuan atas cinta"* (Victor Hugo)

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini khusus saya persembahkan kepada
Ayahanda Basirudin Bunda Suparti
Kakaku Irul&Imron adiku Ika
dan
orang-orang yang selalu setia
dalam menuntun hidupku*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Segala puji milik Allah, dengan segala nikmat-Nya sempurnalah segala kebaikan dan dengan pertolongan-Nya tercapailah semua tujuan. Dialah yang telah menuntun kita kepada Dinul Islam ini. Hingga akhirnya penyusunan skripsi ini selesai.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan atas pembawa kabar gembira Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini bukan karena kemampuan pribadi semata, melainkan berkat bantuan, pengarahan, bimbingan dan beberapa sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak, baik langsung maupun secara tidak langsung, sehingga dalam kesempatan ini penyusun tidak lupa untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan semua jajarannya.
2. Bapak Drs. Abd. Madjid, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan dorongan selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak H. M. Nur, S.Ag. M.Ag. selaku pembimbing II, atas bimbingannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Keluargaku tercinta, Bapak Basirudin dan Ibu Suparti, kakak-kakaku dan adiku. Keluarga yang tidak punya rasa lelah untuk terus-menerus memberi cahaya dalam hidupku. Keluarga yang senantiasa memberi motivasi baik moril maupun materil.
5. Teman-teman KOMARONA (Amin, Qosim, Duel, Bima, dll) dan cah-cah "Den Bagus" yang telah menjadi bagian tersendiri dalam sebuah komunitas.
6. Teman-teman Ijo Lumut (Ahong, Rizano, Johari, Muid, Deni, Dodo dan Yusro). Satu predikat yang tak terlupakan melekat pada diri kita "jomblo" kawan!
7. Dan untuk Idha, hari-hari itu berlalu begitu cepat. *La-Tahzan!* Sudahkah kau temukan mataharimu?

Akhirnya berkat bantuan semua pihak, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Visi, Misi, dan Platform Partai Golkar Perspektif Fiqih Siyasah, dengan baik dan tanpa halangan yang berarti.

Namun penyusun menyadari pula bahwa banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, atas itu semua dengan cara berpikir yang terbuka penyusun membuka diri untuk selalu berdialog demi kesempurnaan tulisan ini baik secara metodologi maupun substansi. Semoga Allah swt selalu memberikan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 3 Dzulhijjah 1425
12 Januari 2005

Penyusun



(Mudasir Abas)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ص	syin	sy	es dan ye
ض	sād	s.	es (dengan titik di bawah)
ظ	dad	d.	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ṣa'	ṣ	zet (dengan titik di bawah)
			koma terbalik di atas
ع	'ain	ʿ	ge
غ	gain	g.	ef
ف	fa'	f	qi

Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif ما	Ditulis ditulis	ā ma
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati نهى	ditulis ditulis	ī nahi
4	dammah + wawu mati حقوق	ditulis ditulis	ū huquq

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya.

إذا علمت اهل الحل	Ditulis ditulis	Iza 'alimat ahl al-hall
----------------------	--------------------	----------------------------

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ETIKA POLITIK.....	19
A. Pengertian Etika, Moral dan Akhlaq.....	19
1. Etika.....	20
2. Moral.....	22

3. Akhlaq	25
B. Etika dalam Kehidupan Manusia.....	27
1. Etika dan Politik.....	27
2. Etika dan Agama	29
3. Etika Politik Islam.....	30
BAB III PROFIL PARTAI GOLKAR.....	37
A. Sejarah Berdirinya Partai Golkar	37
B. Visi, Misi dan Platform Partai Golkar.....	42
1. Visi Partai Golkar.....	43
2. Misi Partai Golkar	45
3. Platform Partai Golkar.....	45
4. Karakteristik	47
C. Prinsip-prinsip Dasar Politik Partai Golkar.....	50
BAB IV ANALISIS TERHADAP VISI, MISI DAN PLATFROM PARTAI GOLKAR	58
A. Ketuhanan	60
B. Kemanusiaan	62
C. Persatuan	65
D. Musyawarah	67
E. Keadilan.....	70
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I Terjemahan.....	I
LAMPIRAN II Biografi Ulama	II
LAMPIRAN III Curriculum Vitae.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak bergulirnya reformasi pada pertengahan tahun 1998 banyak harapan muncul untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa ini. Reformasi membawa angin segar perubahan bagi seluruh komponen bangsa untuk berbenah diri, introspeksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lampau yang menyebabkan krisis di berbagai bidang.

Perbaikan ekonomi, stabilitas keamanan, penegakkan HAM dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi agenda utama reformasi.¹ Memang tak semudah membalik telapak tangan untuk memperbaiki keadaan yang sudah bobrok. Diperlukan semacam terapi agar perbaikan di segala bidang berjalan dengan baik. Dan tidak hanya satu komponen saja yang bertanggung jawab, tetapi kita semua berkewajiban untuk memperbaiki dan membangun kembali negeri di ambang kehancuran ini.

Dibukanya kran reformasi memberikan warna tersendiri dalam wajah perpolitikan di Indonesia. Munculnya partai politik baru dengan latar belakang, visi dan misi serta ideologi yang berbeda, bisa menjadikan peta perpolitikan semakin hidup. Paling tidak, demokrasi yang dulu mati bisa berkembang secara perlahan.

¹ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar 2000), hlm. 228.

Kekerasan, politik uang, dan korupsi memang lekat dengan pemerintahan Orde Baru. Ketiga bentuk kejahatan itu semakin menyadarkan betapa urgensinya penerapan etika politik baik oleh partai politik maupun elit politiknya.

Pertarungan antar-elit politik dalam merebut posisi struktural yang strategis dan mempertahankan jabatannya cenderung menggunakan segala cara tanpa melihat nilai-nilai etis yang telah digariskan partainya. Kekuasaan menjadi tujuan karena tidak ada kawan dan lawan yang abadi yang abadi adalah kepentingan.

Kata etika berasal dari kata Yunani, yakni "*ethos*" yang artinya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bahasa Latin "*ethica*" yang artinya kesusilaan atau moral. Dalam bahasa Inggris disebut "*ethics*" yang artinya ukuran-ukuran perilaku atau tingkah laku yang baik atau tindakan-tindakan yang tepat atau moral pada umumnya.²

Etika dalam politik mau mengarahkan kehidupan baik bersama dan untuk orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan menciptakan institusi-institusi yang lebih adil. Begitu juga landasan yang dipakai setiap partai politik dalam menjalankan tujuan partainya.

Secara umum partai politik dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok terorganisir dengan anggota mempunyai orientasi, nilai-nilai dan tujuan yang

² Drs. Alex Gunur, *Etika sebagai Dasar Pedoman Pergaulan* (Flores: Arnoldus, 1975), hlm. 11.

sama dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya secara konstitusional.³

Politik dan kekuasaan sangat identik dan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Politik dalam pengertian yang sempit dapat dikatakan sebagai cara-cara untuk memperoleh, menyelenggarakan dan mempertahankan kekuasaan.

Politik tidak hanya dimaknai sebagai tujuan kekuasaan, namun lebih dari itu. Ia berperan besar untuk mengatur dan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat yang beradab. Paling tidak politik mempunyai tiga cakupan yang berkaitan dengan pengaturan masyarakat. *Pertama*, politik sebagai ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. *Kedua*, politik sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. *Ketiga*, politik dalam arti kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).⁴

Partai politik sebagai salah satu kendaraan politik yang dipakai para politisi untuk mewujudkan cita-cita politik dinilai sangat efektif. Apalagi setelah diberlakukannya UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Partai politik merebak bak jamur di musim hujan.

Golkar sebagai salah satu partai politik yang masih eksis sejak zaman Orde Lama, Orde Baru dan reformasi, tentunya memiliki kelebihan sehingga keberadaannya masih tetap diperhitungkan. Hal itu bisa dibuktikan dengan

³ Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. XX, (Jakarta: Gramedia, 2000) hlm. 160.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 694.

perolehan suara yang tinggi dalam setiap pemilu. Seseorang tidak akan memilih suatu partai politik tanpa melihat visi, misi dari partai tersebut.

Hal inilah yang menarik untuk melihat partai Golkar secara menyeluruh. Golkar dengan pluralitasnya, keterbukaannya dan demokrasi yang dikembangkan tentunya memiliki daya tarik untuk dikaji lebih dalam.

Golkar sejak Munaslub 1998 telah berbenah diri. Perubahannya *platform*, visi dan misi perjuangan partai disesuaikan dengan kehidupan politik yang sedang berkembang, termasuk di dalamnya perubahan AD/ART.

Partai Golkar memandang krisis yang terjadi saat ini berawal dari krisis moneter. Berkembang menjadi krisis ekonomi, politik dan hukum yang pada hakekatnya bersumber dari krisis kepercayaan, moral, dan etika.⁵ Partai Golkar dituntut untuk melaksanakan reformasi secara konstitusional, konseptual, bersifat terbuka dan dinamis.

Arah perjuangan Partai Golkar pada tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dalam AD bab IV pasal 5 poin 1 dan 3 dijelaskan bahwa tujuan Golkar adalah; *pertama*, mempertahankan, mengamankan, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. *Kedua*, menciptakan masyarakat adil dan makmur merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵ Dewan Pimpinan Pusat Golkar, *Materi Pengkaderan Partai Golkar Tingkat Kabupaten/Kota*. Materi Kelompok B. hlm 30.

Sebagai partai yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang plural, sifat keterbukaan senantiasa dijunjung. Artinya, Golkar tidak memandang suku, ras, etnis dan perbedaan agama dalam sebuah komunitas untuk memajukan bangsa. Bagi Golkar memandang masyarakat dalam perspektif fungsi, bukan dalam perspektif ideologi apalagi aliran. Dalam artian dari etnis atau suku bahkan agama apa saja seseorang bisa menjadi anggota partai yang dilihat adalah peranannya dan dedikasi seseorang untuk kemajuan partai Golkar. Pengelompokan masyarakat yang terbaik dalam pandangan Golkar adalah pengelompokan berdasarkan peran dan fungsi.

Demokrasi yang pada waktu Orde Lama dan Orde Baru mati suri kini mulai dirintis di tubuh Partai Golkar. Ini bisa dilihat dalam setiap pengambilan kebijakan, prinsip musyawarah selalu digunakan. Hal yang menarik dari partai Golkar adalah telah berhasil melakukan konvensi untuk memilih calonnya untuk maju dalam pemilihan presiden. Konvensi sama dengan musyawarah. Dapat juga diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan atau ide termasuk saran.⁶

Secara teknis tujuan dan arah perjuangan partai dijabarkan dalam agenda nasional di mana kebijakan partai merupakan bagian integral dari AD/ART. Sedangkan dalam melaksanakan pokok-pokok program partai, Golkar senantiasa berpegang teguh pada sikap dasar partai yaitu, *pertama*, tetap mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan senantiasa berpegang teguh pada asas kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, demokrasi dan hukum.

⁶ Skripsi Abdul Musa Idris, *Konvensi menurut Partai Golkar dalam Islam*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan. hlm. 46.

Kedua, partai Golkar perlu memelopori pemyamaan visi dan makna substansi reformasi. Orde Reformasi adalah suatu sikap mental dan tatanan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang secara total berpedoman pada asas kedaulatan rakyat, nilai moral etika, keadilan dan kebenaran, serta hak asasi manusia. Orde Reformasi bersifat terbuka dan dinamis, berorientasi pada kerakyatan, bercirikan transparansi, akuntabilitas dan integritas, bersih dari segala bentuk monopoli, kartel, kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Terbentuknya masyarakat yang sejahtera, mandiri, adil, terbuka dan demokratis yang menjadi sendi-sendi penunjang terbangunnya masyarakat madani (masyarakat modern yang berakhlak mulia) merupakan manifestasi komitmen dan kesungguhan Golkar.

Penjabaran dari visi, misi, dan platform yang ada merupakan arah gerak partai Golkar dalam berpolitik. Di dalamnya terdapat aturan-aturan yang harus ditaati oleh kader dan anggotanya serta tujuan yang ingin dicapai dalam rangka membentuk masyarakat yang madani.

Dalam Islam sebuah tatanan masyarakat dengan semangat etis telah terjadi pada masa Rasulullah ketika beliau berada di Madinah dan pada masa kepemimpinan Umar ibn Khatatab. Suatu masyarakat yang mendahulukan perbuatan baik dan kemurahan hati daripada mempertahankan hukumnya yang salah.

Kekuasaan menurut ajaran Islam adalah amanah Allah swt. Sebagai penjelmaan misi kekhilafahan manusia di muka bumi dan dalam rangka

mewujudkan kemaslahatan, kekuasaan bersifat *mas'ulliyah (responsibility)* dan amanah (*credibility*) serta berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat.⁷

Al-Qur'an sebagai ajaran pokok umat Islam di samping al-Sunah terkandung petunjuk-petunjuk dan keterangan global dalam menata kehidupan manusia. Prinsip-prinsip etika dan moral dalam kehidupan yang ada dalam al-Qur'an bertujuan agar masyarakat ditegakkan di atas keadilan dan moralitas. Berdasarkan hal tersebut pemikiran politik Islam dibangun.⁸

B. Pokok Masalah

Dasar pemikiran yang telah dipaparkan di atas cukup memberikan kerangka berpikir untuk mengembangkan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Adapun pokok permasalahannya adalah: Bagaimana etika politik Golkar dalam usaha membangun masyarakat demokratis dari sudut pandangan Fiqih Siyasah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sebagai sebuah karya ilmiah tentunya penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang menjadi sasaran standar bagi penelitiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis etika politik yang menjadi pedoman Partai Golkar dari sudut pandang Fiqih Siyasah.

⁷ Suara Muhammadiyah "Ingat Kriteria Kepemimpinan Nasional Versi Majelis Tarjih" No.06 Th ke-89 edisi 16-31 Maret 2004. hlm. 7.

⁸ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985) hlm. 18.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah memperkaya khazanah keilmuan khususnya studi tentang etika partai politik dan pemikiran politik Islam.

Selanjutnya dapat juga dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian lain dalam studi Partai Politik dari sudut pandang ke Islaman.

Yang terakhir, untuk memenuhi rasa tanggung jawab akademik sebagai kewajiban akhir menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Buku-buku yang membahas tentang Golkar tentunya tidak sedikit, tapi yang pembahasannya spesifik tentang kajian etika politik partai Golkar, sejauh pengamatan penulis belum ditemukan.

Beberapa karya ilmiah yang membahas secara integral tentang etika politik Islam dan Golkar antara lain:

Skripsi Maria Ulfa pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga berjudul *Pemikiran Etika Politik Al-Mawardi*. Studi ini menganalisis etika yang dibangun al-Mawardi dalam kitabnya *Adab ad-Dunya ad-Dien*, yaitu etika yang bersendikan *adab ad-dien*, *adab ad-dunya*, dan *adab an-nafs*.⁹

Skripsi Khabib Basori pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga berjudul *Politik Hukum Islam Di Indonesia, Studi Politik Orde Baru dan Awal Reformasi*. Studi ini menganalisis peta politik yang dibangun Orde Baru yang

⁹ Maria Ulfa, *Pemikiran Etika Politik al-Mawardi*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Tidak diterbitkan, 2002.

diarahkan pada cita-cita pembangunan bangsa. Sedangkan awal reformasi, adanya keterbukaan politik yang diupayakan mereformasi segala lini kehidupan¹⁰.

Skripsi Abdul Musa Idris pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu *Konvensi Partai Golkar Menurut Islam*. Studi ini menganalisis tentang konvensi yang dilakukan Golkar dalam memilih calonnya yang akan maju sebagai presiden dilihat dalam perspektif hukum Islam. Kriteria bagaimana yang diinginkan partai Golkar untuk memilih pemimpin dan mekanisme yang digunakan partai ini di dalam konvensi secara gamblang dijelaskan dalam skripsi ini.¹¹

Skripsi Maftukin pada Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Politik dan Dakwah: Studi Tentang Aktivitas Golkar Dalam Dakwah Islamiah*. Studi ini menganalisis tentang dakwah yang dilakukan Partai Golkar dalam menyiarkan agama, khususnya agama Islam.¹²

Faisal Baasir, di dalam bukunya, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim*¹³ menjelaskan tentang perlunya kekuasaan sebagai amanah, keadilan, kejujuran, penegakan HAM, peradilan bebas, perdamaian dan keselamatan, prinsip kesejahteraan, dan prinsip ketaatan. Nilai-nilai itu merupakan bentuk implementasi dari ajaran agama.

¹⁰ Khabib Basori, *Politik Hukum Islam di Indonesia, Studi Era Orde Baru dan Awal Reformasi*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, 2003

¹¹ Abd. Musa Idris, *Konvensi Partai Golkar: Dalam Perspektif Fiqih Siasah*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan. 2004

¹² Maftukin, *Politik dan Dakwah: Studi tentang Aktivitas Golkar dalam Dakwah Islamiyah*, Skripsi, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan. 2002

¹³ Faisal Baasir, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm.144.

Sedangkan Haryatmoko dalam bukunya, *Etika Politik dan Kekuasaan*,¹⁴ menerangkan tentang budaya politik santun. Ada tiga bentuk pendasaran filosofis bagi pendasaran politik itu pertama, menciptakan dan memberdayakan ruang publik, wahana yang memungkinkan penerimaan pluralitas; kedua, perlunya pendasaran moral bagi institusi dan hukum; ketiga, perlu ditumbuhkan sikap kritis dan bentuk-bentuk perlawanan terhadap semua manifestasi dominasi karena pelaksanaan kekuasaan.¹⁵

E. Kerangka Teori

Ajaran Islam diturunkan oleh Allah swt. guna menjamin kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Agar mencapai kesejahteraan dan keselamatan serta kebaikan (*maslahah*) manusia itu sendiri dalam segala aspek kehidupannya.

Untuk mengimplementasikan kehidupan yang baik, tentunya manusia sebagai makhluk sosial harus berinteraksi dengan manusia lain dan saling mengisi dalam hidup. Keberadaan manusia di muka bumi haruslah membawa kemaslahatan bagi sekalian alam. Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah wujud nyata dari interaksi sosial tersebut. Sehingga tanpa kita sadari, kita sering bersinggungan langsung dengan politik dalam kehidupan baik dalam masyarakat, bernegara dan berbangsa.

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*). Lagipula politik

¹⁴Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.xiii.

¹⁵ *Ibid*

menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan orang perorang.¹⁶

Kata politik tidak hanya dimaknai sebagai tujuan kekuasaan namun lebih dari itu. Ia berperan besar untuk mengatur dan menciptakan kesejahteraan dan masyarakat beradab. Kata politik pertama kali disebut dalam buku Plato yang berjudul *Republika*. Berikuitnya muncul Ariestoteles dengan karyanya yang berjudul *Politea*. Kedua karya itu dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang kemudian berkembang. Dari karya tersebut dapat diketahui bahwa istilah politik merupakan kata yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat. Sebab yang dibahas dalam buku itu merupakan soal-soal yang berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat atau negara paling baik.¹⁷

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata politik paling tidak memiliki tiga cakupan yang berkenaan dengan pengaturan masyarakat. *Pertama*, politik sebagai ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. *Kedua*, politik sebagai segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan. *Ketiga*, politik dalam arti kebijakan dan cara bertindak.¹⁸

Dari sekian definisi yang ada paling tidak dapat ditemukan dua kecenderungan pendefinisian politik. *Pertama*, pendapat yang mengaitkan politik dan negara yakni dengan urusan pemerintahan. *Kedua*, pendapat yang mengaitkan politik dengan masalah kekuasaan, otoritas atau dengan konflik.

¹⁶ Meriam Budiardjo., *Dasar-Dasar*., hlm. 30.

¹⁷ Jeje Abd. Rajak, *Politik Kenegaraan* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm 40.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., hlm.694.

Salah satu yang berkaitan dengan politik adalah kekuasaan, karena bagaimanapun politik mesti menyangkut kekuasaan. Kekuasaan sendiri merupakan sebuah kepercayaan (amanah) yang mengandung makna bahwa kekuasaan itu merupakan obyek yang dilimpahkan pada manusia, dan karena itu pertanggungjawabannya melekat pula padanya. Artinya setiap orang yang diberi kekuasaan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan tersebut. Apakah ia menyelenggarakan amanah sesuai pemberi amanah atau tidak. Bagi orang yang beragama, kekuasaan itu harus dipertanggungjawabkan pada Tuhan dan mereka berada di bawah kekuasaan-Nya. Landasan normatifnya al-Qura'an Surat an-Nisa ayat: 58.¹⁹

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها وإن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

Melihat erat kaitannya antara kekuasaan dengan amanah dan pertanggungjawabannya, maka sangat dibutuhkan para pemegang kekuasaan yang mempunyai moral etika yang baik. Seorang penguasa dapat saja menyelewengkan amanah yang diberikan kepadanya sehingga berdampak pada penderitaan masyarakat luas.

Menurut Ibnu Khaldun seperti dikutip Osman Raliby kepemimpinan politik yang didasarkan atas kekuasaan syariat adalah suatu keharusan sebagai pemegang wibawa itu.²⁰ Daulah (negara) dan mulk (pemegang kekuasaan) mempunyai hubungan yang erat. Keduanya tidak dapat di pisahkan, kehancuran

¹⁹ An-Nisa (4): 58.

²⁰ Osman Raliby, *Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 143.

salah satunya akan mempengaruhi yang lainnya. Sebagaimana tidak ada yang satu akan mengakibatkan tak ada yang lainnya.

Al-Ghazali dalam bukunya *at-Tibr al-Masbuk fi Nasihah al-Mulk*²¹ membicarakan khusus tentang etika penguasa. Baginya, sebagaimana dijelaskan oleh J. Suyuthi Pulungan, kedudukan politik adalah setingkat di bawah kenabian, sehingga etika berpolitikpun harus bersandarkan agama dan moral.²² Selain buku tersebut al-Ghazali juga menulis surat-surat yang telah dihimpun oleh Abdul Qayyum. Surat-surat tersebut ditunjukkan pada para Sultan, Gubernur, Pejabat Pemerintah, para penindas dan penguasa yang korup dan orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Dari surat tersebut terpantul realitas diri yang paripurna dari salah satu pemikir yang paling mengesankan di zamannya yang menolak untuk tunduk pada kekuasaan yang tak bermoral.²³

Dalam karya monumentalnya al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Zainal Abidin Ahmad, menjelaskan betapa pentingnya prinsip-prinsip moral dan etika dalam berpolitik. Bahkan dia menegaskan bahwa moral dan politik bukan saja saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan, tetapi keduanya adalah satu kata majemuk yaitu moral politik yang dalam bahasa Arab disebut *siyasat al-akhlak*.²⁴

²¹ Buku ini merupakan buku yang ditulis al-Ghazali ketika berada di pondok pengasingannya di Thus, di Tukis atas permintaan raja Saljuk Muhammad ibn. Malik Syah pada tahun 189 H.

²² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran Sejarah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994). hlm. 270-272.

²³ *Ibid.*, hlm. 271.

²⁴ Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam al-Ghazali* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) hlm. 158.

Menurut Zainal Abidin Ahmad konsep negara bermoral dalam pandangan al-Ghazali tidak hanya menekankan pentingnya moral etika bagi penguasa atau pejabat pemerintah saja, tetapi rakyat pun memerlukan moral etika yang baik pula. Selain itu juga diperlukan peraturan perundang-undangan atau hukum, baik hukum moral yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku bagi masyarakat. Tidaklah mungkin bertahan lama suatu negara yang tidak berdasarkan moral, sebagaimana halnya tidak mungkin ada hukum moral yang tidak didukung negara.²⁵ Sementara moral yang dimaksud adalah moral yang berdasarkan atau bersendikan nilai-nilai ajaran Islam, yang dinyatakan dengan tegas dengan ideologi Islam. Semua ajaran Islam diarahkan pada pendirian terwujudnya moral politik dan terciptanya politik moral.

Lebih jauh Zainal Abidin Ahmad membagi mengelompokan moral politik al-Ghazali yang tercermin dalam lima hal, yaitu²⁶

1. Insan Kamil. Al-Ghazali menggambarkan insan kamil sebagai orang yang mengabdikan pada Tuhan, berjuang untuk masyarakat dan menyempurnakan sifat-sifat pribadinya untuk menegakan moral politik Islam. Moral bukanlah sesuatu yang berada di luar diri manusia, tetapi sudah tertanam dalam jiwa manusia, yang di dalam Islam disebut fitrah. Karena moral Islam itu diajarkan oleh Tuhan yang menjadikan seluruh alam, maka moral itu adalah yang menjadikan tiang sendi bagi manusia.

²⁵ *Ibid.*, hlm.162.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 183-206.

2. Keadilan. Secara tegas al-Ghazali memajukan pendiriannya supaya sifat keadilan yang merupakan moral politik Islam ini harus dipegang teguh oleh para penguasa negara. Keadilan dalam pandangan Al Ghazali yaitu bertindak tegas terhadap para pelanggar hukum dan memberikan hukuman yang setimpal termasuk kepada para pembersapembesar pemerintahan sekalipun apabila melanggar hukum. Orang yang tidak melakukan keadilan berarti telah melakukan kedholiman, Kedholiman yang dimaksud adalah dhalim terhadap kehormatan dan hak-hak manusia, dholim terhadap harta benda rakyat dan, dhalim terhadap jiwa rakyat. Kedhaliman tersebut merupakan musuh agama , musuh moral, dan, musuh kemanusiaan.
3. Sikap toleransi terhadap paham agama-agama. Al-Ghazali menegaskan bahwa moral politik yang harus dipegang oleh suatu pemerintahan yaitu dengan berlapang dada dan menghormati faham agama yang dianut oleh rakyat, atau oleh negara-negara lain. Tidak saling mengkafirkan sesama umat muslim dan menghargai pendapat dari mazhab yang lain. Sedangkan toleransi terhadap agama lain sudah di buktikan oleh pahlawan Islam Sulthan Salahussin yang hidup tidak jauh dibelakang Al Ghazali, yang diakui lawan dan kawannya.
4. Sifat amanah. Al-Ghazali memandang amanah sebagai moral politik bukan sebagai prinsip politik sebab dia memandang amanah sebagai sifat yang harus dimiliki oleh para penguasa. Amanah yang

dimaksud adalah jujur terhadap apa yang telah diamanahkan kepadanya. Apabila kepala negara maka harus jujur terhadap rakyatnya, jika seorang pemimpin maka jujur terhadap bawahannya dan jika seorang kepala rumah tangga maka ia harus jujur terhadap seluruh keluarganya.

5. Sifat jujur dalam segala transaksi dan komunikasi hidup yang dimaksud adalah sifat amanah di lapangan ekonomi untuk menjaga kelancaran dalam perekonomian. Sedangkan dalam transaksi hidup adalah kita harus amanah terhadap apa yang telah kita omongka dalam segala cabang pergaulan hidup

Untuk itu moral politik menurut al-Ghazali, sebagaimana dikutip J. Suyuthi Pulungan, adalah suatu keharusan bagi penguasa untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta membersihkan aparat pemerintahannya dari sifat tercela, tidak *takabur* dan menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari rakyat.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar karya ilmiah maka dibutuhkan metode yang akan mengarahkan dan sekaligus menjadi pedoman penulisan penelitian tersebut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian pustaka (*library research*) karena data yang digunakan berasal dari kepustakaan yaitu, buku-buku, tulisan-tulisan, jurnal dan dokumen lainya.²⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif adalah memberi gambaran atau keterangan tentang etika politik Partai Golkar. Sedangkan analisis berusaha menganalisis data yang berkaitan dengan etika politik partai Golkar dengan pandangan fiqih siyasah.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Sebagai data primer adalah Garis Besar Haluan Partai dan AD/ART. Sedangkan data sekunder dari buku-buku, tulisan-tulisan, majalah dan artikel yang ada, yang sekiranya mendukung penelitian ini.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan pola pikir induktif yaitu melihat prinsip etika partai Golkar dan prinsip-prinsip politiknya kemudian di analisis dengan etika politik dalam fiqih siyasah.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Maksud dari pendekatan normatif adalah suatu usaha untuk memberi penilaian berdasarkan nilai agama Islam.

²⁷ S. Nasutiao, *Metode Research* (Jakarta :Bumi Aksara, 1996), hlm. 145

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pembahasan yang komprehensif dan spesifik maka pembahasan ini dibagi dalam lima bab dan tiap bab dibagi dalam sub bab.

Pada bab pertama diawali dengan latar belakang masalah sebagai uraian tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan pokok masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang gambaran umum etika politik. Di sini akan di jabarkan pengertian etika, moral dan akhlak dan etika dalam kehidupan. Sebelum nantinya akan di bandingkan dengan etika yang ada dalam Islam.

Bab ketiga menguraikan tentang partai Golkar. Sejarah berdirinya partai Golkar hingga Golkar hasil Munas 1998 yang telah merevisi visi dan misinya dan menempatkan dirinya sebagai kekuatan baru partai di era reformasi. Kemudian prinsip-prinsip politik partai Golkar.

Pada bab keempat merupakan analisis terhadap Visi, Misi dan Platform partai Golkar, yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan kemudian bagaimana Islam menilainya.

Bab kelima yang merupakan penutup dalam penelitian ini berisikan kesimpulan dari rumusan masalah dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat penyusun sampaikan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas tentang bagaimana etika politik partai Golkar dalam usaha membangun masyarakat yang demokratis dari sudut pandangan fiqih siyasah.

Setelah penulis menelusuri berbagai pandangan tentang etika politik partai Golkar dan pemikiran politik Islam dalam berbagai aspek, diperoleh kesimpulan bahwa etika politik yang dibangun partai Golkar sesuai dengan ajaran Islam. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai landasan politik partai Golkar seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sesuai dengan semangat Islam yang menekankan persamaan, persaudaraan, permusyawaratan, keadilan dan ketuhanan.

Moral politik sebagai suatu wacana dan sekaligus hakikat politik tentunya menyangkut aspek-aspek normatifitasnya, dalam hal ini yaitu agama, moral dan tradisi, di mana agama tetap menjadi landasan terbaik etika politik.

Di samping keinginan partai Golkar untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang sejahtera, adil, terbuka, dan demokratis yang menjadi sendi-sendi penunjang terbentuknya masyarakat madani (masyarakat modern berakhlak mulia) juga sesuai dengan semangat Piagam Madinah yang pernah dibuat pada masa Rasulullah akan pentingnya keadilan, persamaan, persatuan, kebebasan,

kemerdekaan, persaudaraan, dan musyawarah. Sebuah masyarakat yang menjunjung semangat etis dalam kebersamaan.

B. Saran-Saran

1. Penelitian tentang partai Golkar bisa dikaji lebih lanjut tentang demokratisasi yang ada dalam tubuh partai Golkar.
2. Etika politik yang ada hendaknya bisa menjadikan acuan dalam berpolitik khususnya kader dan anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al Maraghi*, Beirut: Dar al Fikr, 1974.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1990.

B. Kelompok Fiqih

- Ahmad, Zainal Abidin. *Konsep Negara Bermoral Menurut Imam Al Ghazali* Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Amin, Ahmad. *Akhlaq*, alih bahasa Farid Ma'ruf, Bandung: Mizan, 1997.
- Fakhry, Madjid. *Etika dalam Islam* alih bahasa zakiyuddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Karim, Abdul. *Menggali muatan Pancasila Dalam perspektif Islam*, Yogyakarta: Surya Raya bekerja sama dengan Sunan Kalijaga press, 2004.
- Maududi, Abu A'la. *Moralitas Islam*, alih bahasa, A. Rahman Zainuddin Jakarta: Publicia, 1971.
- Mulia, Musdah, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikirannya*, Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- _____. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah di Tinjau dari Perbandingan Al- Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Konteporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Widodo, L. Amin. *Fiqih Siyasah Dalam Sistem Kenegaraan dan Pemerintahan*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1994.

C. Kelompok Buku Lain

- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Baasir, Fuad, *Etika Politik Pandangan Seorang Politisi Muslim*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Basori, Khabib. *Politik Hukum Islam di Indonesia, Studi Era Orde Baru dan Awal Reformasi*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Bertens, K. *Etika*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Budiardjo, Meriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2000
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- DPP Golkar, *Materi Pengkaderan Partai Golkar Tingkat Kabupaten/Kota. Materi Kelompok B. Ideologo Kenegaraan dan kebangsaan*. Tt
- DPP Golkar, *Materi Pengkaderan Partai Golkar Tingkat Kabupaten/Kota. Materi Kelompok A. Pengetahuan ke-Golkar-an*. Tt
- DPP Golkar, *Materi Penyegaran Kader Golongan karya*. 1998.
- Djatnika, Rahmat. *Sistem Etika Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996.
- Efendy, Bahtiar. *Islam Di Tengah Polarisasi Politik*, Jakarta: Mediacita, 2000.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2000.
- Gunur, Alex. *Etika Sebagai Dasar Pedoman Pergaulan*, Flores: Arnoldus, 1975.
- G-Martha, Ahmaddani. *Akbar Tandjung Menghadang Badai*, Jakarta: Brajendi Communication Manggala Wanabajti.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Hadiwardoyo, Purwa. *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Jeje, Abd Rajak. *Poltik Kenegaran*, Jakarta: Rajawali, 1982

- Budiardjo, Meriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Musa Idris, Abdul. *Konvensi menurut Partai Golkar dalam Islam*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2004
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Majdid, Nurcholis. *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- _____. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam _Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Maftukin. *Politik dan Dakwah: Studi tentang Aktivitas Golkar dalam Dakwah Islamiyah*", Skripsi, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga.2002
- Neufild Victory (ed). *New World College Dictionary*, third edition (New York: Macmillar, 1996.
- Noer, Deliar. *Pengantar Kepemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Nasutiao, S. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Raliby, Osman, *Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*, Jakarta: Bulan Bintang,1978.
- Rais, Amien. *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan, 1999.
- Salim, Hairus. *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, Yogyakarta, LKiS, 1999
- Sardar, Zianuddin. *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, terjemah. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1993.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar: Pokok-Pokok Masalh Filsafat Moral* Yogyakarta: Kanisius, 1996
- Sunoto. *Mengenal Filsafat Pancasila*, seri I, Yogyakarta: Bagian Penerbit FE UII, 1981.
- Suryadinata, Leo. *Golkar dan Militer Study Tentang Budaya Politik*, Jakarta: PT. Pusatka LP3ES, Anggota IKAPI, 1995.
- Syafi'i, Inu Kencana. *al-Qur'an dan Ilmu politik*, Jakarta: Rieka Cipta

Suara Muhammadiyah "*Ingat Kriteria Kepemimpinan Nasional Versi Majelis Tarjih*" No.06 Th ke-89 edisi 16-31 Maret 2004.

Tempo, "*Di Gerbang Kebebasan Akbar*" edisi 9-15 Februari 2004

Titus, Harold H. *Persoalan-Persoalan Filsafat*, alih bahasa H.M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Ulfa, Maria. *Pemikiran Etika Politik al-Mawardi*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Widodo, L. Amin. *Fiqh Siyasah Dalam Sistem Kenegaraan dan Pemerintahan*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1994

WJS Poerwadarminta. *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Yusuf, Ramli HM SH. *Golkar Abad XXI*, Jakarta: LASPI, 2000

Zakiyuddin. *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Etika Al-Qur'an*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UMS, 1994.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
I	12	19	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
II	32	34	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
	32	-	Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW. Telah bersabda: "Barang siapa yang taat kepadaku, berarti taat pada Allah, dan barang siapa melanggar padaku berarti melanggar pda Allah. Dan siapa yang taat pada pemimpin berarti taat padaku, dan siapa maksiat pada pemimpin berarti maksiat padaku."
	32	36	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
	33	37	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

IV	63	7	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
	71	22	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Muhamad Husain Haikal

Di lahirkan pada tanggal 30 Agustus 1888 di desa Kafr Ghanam, wilayah Mersir Hilir, sekitaar 140 km dari Kairo dan hanya beberapa kilometer dari desa Burqin, tempat kelahiran lutfi Sayyid, seorang tokoh nasionalis terkemuka Mesir yang dikemudian hari menjadi guru besar dan mempunyai pengaruh terhadap pembentukan keperibadian, pandangan hidup dan orientasi politik Haikal, dan juga kawan seperjuangannya. Haikal lahir dari keluarga beradab, terpendang dan terpengaruh di desa dan kawan sekitarnya. Pada tahun 1946 Haikal mencoba memberikan gambaran tentang betapa bahagiannya kehidupan di as kecilnya dalam satu karangan pendek yang berjudul "Hidup itu penuh cinta kasih".

2. Al-Ghazali

Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad ibn at-Thusi Al-Ghazali yang hidup antara tahun 459-505 H/1058-1111 M. Ia di kenal sebagai tokoh pembaharu dalam Islam yang dinisbahkan kepada keberhasilannya dalam mengawinkan masalah hukum Islam (al-fiqih) dengan ajaran moral (at-Tasawwuf), dengan sedikit dikategorikan sebagai tokoh filsafat. Karyanya monumentalnya yang masih menjadi rujukan politik Islam anatar lain *at-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Mulk* yang menerangkan konsep kenegaraanya yang berwawasan moral dan *Ihya Ulum addin*'.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama: : Mudasir Abas

TTL : Banyumas, 26 November 1981

Orang Tua

Ayah : Basirudin

Ibu : Suparti

Alamat : Jl. Serayu I Rt 03/VI Rawalo Banyumas Jawa-Tengah

Pendidikan:

1. SD N Rawalo II (1988-1994)
2. SLTP N Rawalo I (1994-1997)
3. MA "Rodlotun Nasyi'in" Berat Kulon Kemlagi Mojokerto (1997-2000)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk tahun 2000)